

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Krisis pengungsi yang terjadi di kawasan Eropa pada tahun 2015 disebabkan oleh meletusnya *civil war* yang terjadi di Suriah pada tahun 2011. Para pengungsi yang mencari suaka masuk ke kawasan Skandinavia, khususnya Finlandia dan Swedia, yang pada saat itu menjadidi host country bersama negara-negara anggota Uni Eropa, setelah melewati perjalanan berminggu-minggu. Suriah, Irak, hingga Afghanistan merupakan negara dengan jumlah pengungsi yang terbilang banyak di negara Finlandia dan Swedia.

Melalui kerangka teori perubahan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional dan, Konvensi Pengungsi 1951, dalam skripsi ini penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada teori perubahan kebijakan luar negeri, digunakan sebagai dasar dari analisis pada perubahan-perubahan kebijakan yang diambil oleh Finlandia dan Swedia. Sedangkan konsep kepentingan Nasional menjadi wadah penulis untuk mengetahui alasan-alasan atas perubahan kebijakan yang diambil. Dan Konvensi Pengungsi 1951 menjadi acuan penulis untuk menjelaskan keterkaitan kebijakan dengan pengungsi.

Sebelum krisis pengungsi terjadi, Finlandia dan Swedia menjadi negara yang cukup terbuka bagi para pengungsi atau imigran. Terlebih lagi, kedua negara tersebut aktif dalam organisasi-organisasi internasional

seperti UNHCR yang fokusnya adalah untuk para pengungsi. Dengan adanya permasalahan tersebut, Finlandia dan Swedia mendapatkan dampak yang negatif dari para pengungsi. Sejumlah kegiatan seperti aksi demo dilakukan oleh masyarakat lokal di kedua negara sehingga Pemerintah Finlandia dan Swedia mengambil keputusan untuk mengganti kebijakan imigrasi mereka. Kebijakan yang diganti juga dibawah yuridiksi Uni Eropa yang menaungi kedua negara tersebut. Opini publik, media massa, hingga sejumlah partai yang ada di Finlandia maupun Swedia mempunyai peran yang cukup penting dalam perubahan kebijakan imigrasi mereka.

Perubahan kebijakan yang paling menonjol dan paling umum, diambil oleh negara-negara yang menampung pengungsi-pengungsi tersebut, secara khusus Finlandia dan Swedia, adalah kebijakan pintu tertutup yang awalnya merupakan kebijakan terbuka. Kebijakan pintu tertutup di kedua negara diaplikasikan dengan memperketat kontrol perbatasan. Tak hanya itu, kebijakan lain seperti aturan pemberian dan perpanjangan izin tinggal juga diketatkan, meningkatkan standar pada reunifikasi keluarga di Finlandia dan Swedia, hingga mengurangi bantuan dana untuk pengungsi, dan lain sebagainya.

Perbedaan dari perubahan kebijakan yang diambil oleh negara Finlandia dan Swedia meski mereka berada di bawah naungan Uni Eropa adalah dalam perubahan kebijakan pajaknya dan membatasi diberikannya bantuan hukum oleh negara di Finlandia, sementara Swedia tidak merubah kebijakan pajaknya meski dana yang mereka keluarkan terhitung sangat

banyak. Namun, Swedia juga mengambil kebijakan untuk mengetatkan regulasi para pengungsinya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam merubah kebijakan di negara mereka guna mengatasi krisis pengungsi yang terjadi, Finlandia dan Swedia merubah kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing dan masih mengikuti arahan yang diberikan oleh Uni Eropa.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebab dalam penulisan penelitian ini terbatas pada referensi yang terbilang sedikit pada perubahan kebijakan yang terjadi di negara Finlandia dan Swedia mengenai pengungsi lebih lanjut, penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya akan banyak referensi yang menjelaskan mengenai perubahan-perubahan kebijakan di kedua negara secara lebih luas.